

**IMPLEMENTASI PROGRAM AREA TRAFFIC CONTROL
SYSTEM OLEH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA**

Annisa Isnuhani Syafitri, Kus Indarto

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 4, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Area Traffic Control System oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Pengarang : Annisa Isnuhani Syafitri

NIM : 1802015072

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 15 Agustus 2023

Pembimbing,



Dr. Kus Indarto, S.Sos., M.AP

NIP 19740401 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume : 11	
Nomor : 4	
Tahun : 2023	
Halaman : 895-908	

IMPLEMENTASI PROGRAM AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Annisa Isnuhani Syafitri ¹, Kus Indarto ²

Abstrak

Area Traffic Control System (ATCS) adalah suatu sistem pengaturan lalu lintas bersinyal dan terkoordinasi yang diatur untuk mencakup area secara terpusat. Terkait kebijakan berlalu lintas yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program ATCS di Kota Samarinda, serta mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program ATCS di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan fokus penelitian yang mencakup organisasi, interpretasi dan implementasi serta faktor penghambat implementasi program ATCS. Sumber data yang diambil menggunakan data primer yang menjadi key informan yaitu Kepala Seksi Lalu Lintas, Kepala Seksi Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Sedangkan untuk informan yaitu pegawai dan masyarakat. Adapula data sekunder yang diperoleh dari jurnal, penelitian terdahulu, dan berita online yang berkaitan dengan ATCS di Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumen, dan studi pustaka. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian ini terlihat jelas melalui penerapan program Sistem Pengendalian Lalu Lintas Regional di Kota Samarinda, dimana Dinas Perhubungan sudah menerapkan ATCS namun belum melaksanakannya secara maksimal. Program ini pun juga membantu masyarakat yaitu mengurai kemacetan dan memberikan fasilitas untuk masyarakat untuk memperoleh informasi pada tiap persimpangan. Walaupun implementasi program ATCS ini belum berjalan maksimal karena terdapat hambatan dalam menjalankannya tetapi pihak pelaksana sudah menjalankan program ini dengan baik. Hambatan dalam Implementasi program Area Traffic Control System adalah kurangnya anggaran dana dan sarana prasarana. Sehingga menyebabkan kurangnya kinerja pemantauan serta penguraian kemacetan di tiap persimpangan yang terdapat ATCS dengan berstatus aktif, sehingga program tidak berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : *Implementasi Program, Area Traffic Control System*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: annisaisnu@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemacetan yang tinggi. Hal ini tercermin dari pesatnya perkembangan perkotaan, tingkat mobilitas manusia dan terus bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan teknologi sangat diperlukan untuk memudahkan mobilitas masyarakat, khususnya dengan menggunakan alat transportasi untuk beraktivitas di tengah masyarakat. Transportasi adalah pergerakan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan yang dikendalikan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memperlancar aktivitas masyarakat sehari-hari (Da Cruz, 2018). Salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah kendaraan bermotor. Keanekaragaman transportasi yang ada dan meningkat serta tidak diimbangi dengan perluasan jalan atau fasilitas lalu lintas untuk mendukung jalur transportasi, sehingga menyebabkan kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Samarinda yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk yang tercatat pada bulan September menurut hasil Sensus Penduduk 2020 adalah sebanyak 827.994 jiwa.

Kota Samarinda adalah salah satu kota dengan tingkat mobilitas transportasi yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 mencapai 815.342 unit. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat ini menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda.

Padahal Pemerintah telah menyerukan adanya gerakan nasional disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masalah lalu lintas jalan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menciptakan dan memelihara lalu lintas jalan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar. Untuk mencapai, menunjang, dan memelihara keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas, peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas dan angkutan jalan tersebut di atas diperkuat dengan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Keteknikan, Analisis Dampak, dan Manajemen Permintaan Lalu Lintas. Implementasi ini didukung oleh Peraturan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No. PM 96 Tahun 2015. Namun permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, perilaku kriminal, pelanggaran peraturan lalu lintas jalan raya, dan kecelakaan masih sering kita hadapi. masih populer. Dalam menyikapi permasalahan yang semakin kompleks ini Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai pelaksana menerapkan suatu program yaitu program *Area Traffic Control System (ATCS)*.

ATCS adalah sistem manajemen lalu lintas yang terkoordinasi dan diberi sinyal yang dirancang untuk mencakup suatu area secara terpusat. *ATCS* ini dirancang secara terpusat di setiap persimpangan yang terdapat *Traffic Light* yang dilengkapi *CCTV* dan pengeras suara yang dipantau langsung melalui ruang

kendali. Upaya manajemen rekayasa lalu lintas dapat dilakukan dengan menggunakan *ATCS* dan mengkoordinasikan semua simpang bersinyal melalui ruang kendali *ATCS* untuk menjaga status pergerakan lalu lintas yang efisien. Teknologi *ATCS* sendiri sudah tersebar luas di kota-kota besar di Indonesia. *ATCS* digunakan untuk memantau lalu lintas di setiap persimpangan yang dikendalikan dari ruang kendali pusat (Alam et al., 2021)

Dengan adanya *ATCS* penyesuaian siklus lampu lalu lintas dilakukan berdasarkan masukan data lalu lintas yang diperoleh secara real time oleh kamera CCTV yang memantau lalu lintas di persimpangan Kota Samarinda. Tingkat lalu lintas akan lebih baik bila pemerintah kota menggunakan teknologi *ATCS* di seluruh persimpangan di Kota Samarinda. *ATCS* di Kota Samarinda ini pernah aktif di tahun 2008 sehingga *ATCS* ini bukan suatu hal baru di Kota Samarinda. Oleh karena itu program *ATCS* ini hadir untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Warga Samarinda dapat segera mengetahui situasi terkini di Samarinda melalui *command center* CCTV yang dioperasikan oleh Dinas Informatika dan Komunikasi Samarinda yang dapat diakses melalui website Pemerintah Kota Samarinda www.diskominfo.samarindakota.go.id.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi program *Area Traffic Control System (ATCS)* di Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam implementasi program *Area Traffic Control System (ATCS)* di Kota Samarinda?

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Abdoellah & Rusfiana (2016), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan menurut Udoji dalam Abdoellah & Rusfiana (2016), kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dirasakan mengarah pada suatu tujuan tertentu yang berkaitan dengan suatu isu tertentu atau sekelompok isu yang saling terkait, berdampak pada sejumlah besar orang, sejumlah warga negara tertentu. di masyarakat. . Dengan kata lain, Kebijakan publik adalah peraturan atau tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh suatu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat atau pemerintahan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Pramono (2020), mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai suatu tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan meliputi kegiatan dalam jangka waktu tertentu dan sebagai bagian dari upaya terus menerus untuk

mencapai perubahan besar maupun kecil yang ditentukan oleh keputusan politik lembaga publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sementara itu, menurut Udoji dalam Mustari (2015), implementasi kebijakan publik sangatlah penting, bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya akan menjadi impian, rencana yang baik akan sia-sia jika tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik adalah tahapan pada proses kebijakan publik dimana kebijakan tersebut wajib di implementasikan agar memiliki pengaruh atau tujuan yang di inginkan.

Implementasi Program

Implementasi Program Menurut Korten dalam Sarah (2017), pelaksanaan program berfokus pada tiga faktor terkait, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Suatu program akan berhasil dilaksanakan apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi. Jika ketiga unsur pelaksanaan program tidak sesuai maka kinerja program tidak akan berhasil seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kesesuaian tersebut sangat penting agar program dapat berjalan sesuai rencana.

Area Traffic Control System

Sistem manajemen lalu lintas regional “ATCS” merupakan suatu sistem yang mengendalikan persimpangan jalan melalui lampu lalu lintas, dimana pemasangan lampu lalu lintas pada setiap persimpangan dikoordinasikan agar peserta lalu lintas mengalami tundaan sesedikit mungkin. Penerapan ATCS atau sinyal lalu lintas yang terkoordinasi akan menghasilkan efisiensi perjalanan dan peningkatan kapasitas layanan lalu lintas di persimpangan, waktu perjalanan yang lebih singkat, dan penurunan risiko kecelakaan bagi pengemudi dan lalu lintas, sekaligus berpotensi memberikan keselamatan yang lebih baik bagi pejalan kaki atau penyeberang jalan, serta kenyamanan lebih bagi peserta lalu lintas. ATCS sangat efektif jika diterapkan pada persimpangan yang banyak terjadi konflik lalu lintas dan volume lalu lintas tinggi (Naway & Suryani, 2023).

Definisi Konseptional

Implementasi program ATCS adalah dengan menerapkan sistem manajemen lalu lintas melalui lampu lalu lintas untuk ruang kendali dan sistem lalu lintas lainnya serta data video kondisi lalu lintas di persimpangan melalui kamera observasi real-time. Dengan penerapan ATCS, sinyal lalu lintas menjadi lebih terkoordinasi, memberikan efisiensi perjalanan dan meningkatkan kapasitas lalu lintas persimpangan, sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat, pendek, dan penurunan tingkat resiko kecelakaan. Dalam penerapan ATCS, terdapat beberapa indikasi masalah yang peneliti temukan dan berdasarkan indikasi masalah tersebut dalam pelaksanaan implementasi program ATCS di Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: implementasi program ATCS di Kota Samarinda yang meliputi Organisasi, Interpretasi atau Pemahaman serta Implementasi atau Penerapan. Dan terdapat faktor penghambat implementasi program ATCS di Kota Samarinda

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumber pertama, data ini diambil dari wawancara informan. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan yaitu Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Kepala Seksi Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Sedangkan untuk informan yaitu pegawai dan masyarakat. Data sekunder yaitu data pelengka yang diperoleh dari jurnal, penelitian terdahulu, berita online yang berkaitan dengan ATCS di Kota Samarinda.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan catatan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:14), khusus pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Program Area Traffic Control System di Kota Samarinda

Implementasi program *Area Traffic Control System* merupakan program guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dari kemacetan, pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas. Kemudian dalam implementasi program ATCS ini memerlukan beberapa aspek dan implementasi menurut Jones merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana program ATCS diimplementasikan. Terdapat beberapa indikasi masalah yang peneliti temukan dan beberapa indikasi masalah tersebut dikaitkan dengan teori Jones dalam pengimplementasian program ATCS di Kota Samarinda :

A. Organisasi

Menurut Jones dalam Leyn (2019), kegiatan pengorganisasian adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengatur kembali sumber daya, unit dan metode yang mengarah pada upaya untuk mencapai atau mengkonkretkan kebijakan menjadi hasil yang konsisten dengan tujuan sasaran dalam kebijakan organisasi. Organisasi dalam hubungan dengan pelaksanaan Kebijakan tersebut dapat berupa identifikasi unit kerja yang ada, pembagian tugas masing-masing unit organisasi baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana dalam organisasi. Pembahasan faktor organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Struktur Organisasi*

Jones, Pariema dkk. (2016), struktur organisasi adalah suatu sistem aturan formal, tugas, dan hubungan kekuasaan yang mengatur bagaimana anggota organisasi bekerja sama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan temuan yang diperoleh, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki struktur organisasi yang jelas dan cukup terstruktur di bidang transportasi, serta adanya rencana pengawasan khusus terhadap operator ATCS. Keberadaan dan kedudukan struktur organisasi yang jelas dan teratur cenderung mengatur dan mendistribusikan pekerjaan di antara para anggota organisasi agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b) *Sumber Daya Manusia*

Menurut Hamali (2016), sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang ada pada suatu organisasi, termasuk seluruh orang yang melakukan kegiatan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas orang-orang yang membentuk organisasi tersebut. Suatu organisasi dengan sumber daya manusia yang terampil akan mampu meningkatkan kinerja pegawainya, yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja organisasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia yang ada dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan merupakan tenaga ahli yang telah menguasai bidangnya masing-masing sehingga program ini dapat dijalankan dengan baik. Sumber daya manusia dalam menjalankan program ATCS ini pun telah mencukupi jumlah maupun kemampuannya. Sama halnya dengan penelitian Neviana & Soedarsono (2020) menjelaskan bahwa Sumber daya yang diperlukan untuk mendukung program ATCS sebagai sarana komunikasi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas memerlukan peningkatan sumber daya, seperti sumber daya manusia dan fasilitas.

c) *Keuangan atau Anggaran Dana*

Anggaran Dana menurut Freeman dalam Nasution (2013) Penganggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga sektor publik untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran juga dapat dianggap sebagai pernyataan perkiraan kinerja keuangan yang akan dicapai selama periode waktu tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam memperoleh anggaran dana yaitu dari APBD, dana yang diperoleh sebesar 2,5 miliar rupiah yang dimana dengan dana sebesar itu sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan program ini. Bahkan untuk melakukan perbaikan pun hanya bisa dilakukan secara bertahap karena kurangnya anggaran yang diperoleh. Dan satu simpang pun hanya dapat anggaran sekitar 500 juta rupiah saja. Sehingga dalam

implementasi program ATCS ini sangat dibutuhkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.

d) *Sarana dan Prasarana*

Menurut Moenir dalam Armansyah (2018) Sarana adalah segala jenis alat yang berfungsi sebagai alat utama atau sarana langsung untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan infrastruktur merupakan seperangkat alat yang bekerja secara tidak langsung untuk mencapai tujuan. Untuk membedakan keduanya dengan mudah, fasilitas lebih banyak melayani benda bergerak, sedangkan infrastruktur lebih banyak melayani benda diam seperti bangunan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang tepat dan berkualitas akan memaksimalkan kemampuan dalam menjalankan aktivitas kelompok.

Hasil penelitian di Dinas Perhubungan Kota Samarinda menunjukkan bahwa sarana dan prasarannya masih sangat kurang dan sering terjadi kerusakan dan kehilangan perangkat yang ada dilapangan. Ruang kendali pun perlu diperbesar agar dapat memantau area lebih luas melalui monitor. Sarana perangkat yang sering dicuri dan hilang merupakan kabel *fiber optic*. Kabel *Fiber Optic (FO)* adalah Jenis kabel yang mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan menyalurkannya atau mengirimkannya dari satu titik ke titik lainnya. Sama seperti penelitian Alam et al. (2021) menyatakan bahwa untuk ruang kendali ATCS belum memadai dan masih sangat kurang sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan yang ada.

B. Interpretasi

a) *Koordinasi Program*

Teori Djamin dalam Pusdikmin (2014) dengan jelas disebutkan bahwa koordinasi adalah upaya kerjasama antar lembaga, badan, dan unit dalam melaksanakan tugas tertentu sehingga terjadi saling melengkapi, membantu, dan saling melengkapi. Koordinasi berarti menghubungkan, menyatukan dan mengatur seluruh kegiatan dan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya keterkaitan antar OPD. Sehingga pihak Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan pihak Dinas Kominfo dan juga Satlantas yang dimana koordinasi itu berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan sebagai monitoring keadaan lalu lintas dan penindakan, dan Dinas Kominfo sebagai penyedia jaringan koneksi.

b) *Penanggung jawab Program dan Kinerja Pelaksana*

Menurut Robbins dan Coulter dalam Nugroho (2021) percaya bahwa pemantauan adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut selesai operasi yang direncanakan dan membenarkan penyimpangan yang signifikan. Pengawasan oleh atasan adalah pengawasan menyeluruh terhadap kinerja kegiatan oleh bawahan dengan tujuan agar atasan mengetahui kegiatan sebenarnya dan segala aspek pelaksanaan tugas atau lingkungan unit

organisasi masing-masing dan tidak menyimpang dari upaya pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait bahwa berjalannya program *ATCS* di Kota Samarinda ini berada pada tanggung jawab Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Kepala Seksi Lalu Lintas sebagai pengawasan dalam menjalankan program *ATCS*. Kinerja pelaksana pun telah baik, tetapi kinerja dalam melaksanakan program ini menyesuaikan dengan lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jika sarana prasarana aman, lengkap, tidak ada kerusakan dan performa perangkat baik maka kinerja yang dihasilkan pun maksimal.

c) *Akses Program*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa akses adalah kegiatan berinteraksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau berjaringan. Menurut teori penjelas umum pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, yang dimaksud dengan “penyediaan” adalah tindakan yang tidak menyangkut pendistribusian atau transmisi informasi elektronik melalui sistem elektronik Masu. Informasi dan/atau dokumen elektronik dapat tersedia bagi pihak lain dan masyarakat. Setiap program yang dibuat pemerintah guna memberi kemudahan dan membantu penyelesaian masalah yang ada di masyarakat serta dijalankan dan ditujukan untuk masyarakat, tentu saja dapat di akses secara mandiri oleh masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Samarinda menyatakan bahwa telah membuat program *ATCS* yang digabungkan dengan *CCTV* sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat dapat mengakses melalui website portal resmi diskominfo.samarindakota.go.id dan juga dapat melihat informasi *CCTV* melalui social media yang dibuat oleh pelaksana *ATCS*.

C. Penerapan

a) *Sosialisasi Program*

Sosialisasi merupakan upaya mempopulerkan sesuatu agar diketahui, dipahami, dan diapresiasi oleh masyarakat. Sosialisasi sendiri sangatlah penting, karena tanpanya tujuan yang kita tetapkan untuk diri sendiri dan orang lain tentu tidak akan tercapai. Pada hakikatnya tujuan sosialisasi adalah membangun hubungan kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat dan organisasi yang ada. Melalui kerja sama yang erat, kami berharap masyarakat memiliki rasa memiliki sehingga tidak hanya menerima manfaat tetapi juga difasilitasi. untuk terlibat secara lebih berarti (Yuliana, 2021). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah mensosialisasikan adanya program *ATCS* agar masyarakat tahu bahwa program ini diperuntukkan bagi masyarakat sehingga program tersebut terus berjalan sesuai tujuan. Masyarakat pun sudah menerima informasi terkait program *ATCS* melalui media social. Media sosial sendiri merupakan sebuah

platform dengan fasilitas yang memungkinkan penggunaannya, dalam hal ini masyarakat, untuk melakukan aktivitas sosial. Kegiatan sosial ini dapat berupa komunikasi atau interaksi sosial melalui pengiriman atau pemberian informasi, berbagi foto dan video, dan lain-lain. tergantung pada fasilitas yang tersedia. Media sosial yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah Instagram dan Twitter. Melalui hal tersebut, Kementerian Perhubungan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi tentang video pengawasan *ATCS*.

b) *Ketepatan Sasaran Program (efektivitas)*

Menurut Siagian dalam Sari (2021), menjelaskan bahwa penilaian baik atau tidaknya suatu tugas dapat dilihat dari proses pelaksanaannya serta biaya penggunaannya. Sedangkan efisiensi dikemukakan oleh Ahadi dalam Sari (2021), yaitu suatu organisasi bisa saja efisien namun tidak efektif dalam pendekatannya dalam mencapai tujuannya. Semakin dekat tujuan suatu organisasi dengan tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut.

Maka hasil penelitian menyatakan bahwa program *ATCS* yang di laksanakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini pun telah tepat sasaran karena memberikan informasi wilayah yang terdampak macet dan banjir kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menghindari wilayah tersebut dan juga mengurai kemacetan yang ada dengan mengatur timing melalui ruang kendali *ATCS*. Meskipun terkadang kemacetan tidak dapat kami urai melalui *CC Room* tetapi kami mengerahkan petugas lapangan agar mengurai kemacetan secara manual. Jadi kemacetan ini belum sepenuhnya dapat dihindari dan diatasi tetapi, Dinas Perhubungan Kota Samarinda selalu mengupayakan untuk mengatasi kemacetan apapun penyebab dari kemacetan itu baik melalui *CC Room* maupun secara manual di lapangan.

c) *Prosedur Kerja*

Menurut Nuraida dalam Reza (2019), yang menyatakan bahwa proses menunjukkan bagaimana melakukan suatu pekerjaan, suatu tugas terdiri dari satu atau lebih aktivitas yang ditulis oleh karyawan dengan cara menggabungkan serangkaian metode menjadi suatu proses. Maksud Nuraida jika dipahami, suatu proses adalah suatu metode, dalam artian metode itu dipersiapkan untuk masa depan dan dapat digunakan terus-menerus apabila Cara ini digunakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mempunyai proses yang baik dalam menjalankan aktivitas atau operasionalnya, agar keputusan yang diambil wajar, efektif dan efisien, sehingga organisasi tidak mengalami kerugian dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda menjalankan program *ATCS* ini seharusnya ada prosedur tetapi dalam Dinas Perhubungan Kota Samarinda, prosedur atau pedoman

tersebut tidak tertulis melainkan hanya berupa arahan atau *briefing* sebelum kegiatan dimulai. Sehingga dalam menjalankan tugas, petugas ATCS tidak memiliki pedoman pasti secara tertulis karena hanya mendapatkan arahan dari atasan dalam menjalankan program ini. Namun, pelaksanaan program ini tetap berjalan dengan baik meskipun tanpa pedoman khusus yang secara tertulis.

2. Faktor Penghambat Implementasi Program ATCS di Kota Samarinda

Terdapat banyak permasalahan atau hambatan yang dialami oleh pelaksana kebijakan baik dari internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat dalam Implementasi Program ATCS di Kota Samarinda yaitu :

a. Anggaran Dana

Anggaran adalah rencana keuangan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Anggaran ini sendiri sangat penting untuk menunjang pelaksanaan program ATCS yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dimana dengan adanya anggaran ini kebutuhan penunjang akan tercukupi. Dinas Perhubungan Kota Samarinda menyampaikan bahwa anggaran program ATCS pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda pun belum tercukupi juga. Padahal, Kasi Lalu Lintas hanya menganggarkan 500 juta untuk satu simpang, yang dimana anggaran tersebut sudah sangat ditekan. Dan anggaran pertahunnya dana yang diperoleh sebesar 2,5 miliar rupiah yang dimana dengan dana sebesar itu sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan program ini.

b. Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kota Samarinda menyebutkan bahwa sarana dan prasarana yang memadai maka dapat menciptakan kinerja yang akan berjalan dengan baik, jadi sarana prasarana ini merupakan hal yang harus dipenuhi dan sangat penting dalam berjalannya suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hasil penelitian disampaikan bahwa sarana prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam implementasi program ATCS ini masih kurang lengkap. Karena sering terjadinya kerusakan maupun kehilangan pada perangkat terutama yang ada dilapangan dan arena kurangnya anggaran, maka perangkat yang hilang maupun rusak itu tidak dapat segera diganti. Sehingga mengurangi kinerja yang di ruang kendali karena tidak dapat memantau area persimpangan tersebut. Seperti halnya dalam penelitian Setiawan (2018) bahwa program ATCS (*Area Traffic Control System*) masih belum terlaksana secara maksimal di Kota Bandar Lampung baik sebelum maupun sesudah bergulirnya program ATCS (*Area Traffic Control System*) tersebut dan program ini belum terlihat manfaatnya karena masih tingginya tingkat kemacetan. Salah satu penyebabnya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini dapat dibuktikan dengan kamera pengintai atau CCTV di persimpangan padat yang belum terpasang secara

lengkap dan juga jumlah kendaraan bermotor yang masih kurang, karena kendaraan bermotor tersebut digunakan oleh pegawai, hal ini diperlukan karena kerusakan peralatan teknis dapat terjadi di beberapa titik pada saat yang bersamaan dan itu harus ditangani dengan cepat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat dua poin yang ditemukan yaitu mengenai:

1. Implementasi Program *Area Traffic Control System* di Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program *ATCS (Area Traffic Control System)* belum berjalan dengan maksimal hal tersebut dikarenakan setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, tenaga pelaksana yang berkualitas dan perangkat kerja serta didukung oleh perangkat hukum yang jelas. Dalam menjalankan organisasi dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidangnya dan tercukupi jumlahnya. *CCTV* merupakan alat penunjang pemantauan *ATCS* yang dimana *CCTV* ini dapat di akses oleh masyarakat umum. Masyarakat pun sudah banyak tahu mengenai program yang dapat di akses secara mandiri ini. Program *ATCS* ini keberadaannya telah disosialisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda melalui media sosial yang dinilai agar dapat lebih cepat dan efisien dalam penyebaran informasi. Karena sosialisasi melalui media social lebih diutamakan, masyarakat yang tidak menggunakan media social pun kurang mendapat informasi terkait adanya *ATCS* ini.
2. Ditemukan beberapa faktor penghambat dalam Implementasi Program *ATCS* di Kota Samarinda oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, yakni: Anggaran Dana. Dinas Perhubungan Kota Samarinda memperoleh anggaran dari APBD, yang dimana anggaran tersebut hanya sebesar 2,5 milyar. Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dikatakan kurang memadai, karena dengan anggaran yang terbatas maka persediaan kebutuhan untuk menjalankan program *ATCS* pun terbatas juga sehingga masih kurangnya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja yang lebih baik sehingga persimpangan yang terdampak kemacetan tidak dapat terpantau oleh pegawai ruang kendali *ATCS*. Tetapi program ini tetap dijalankan sebaik mungkin dengan sarana dan prasarana yang telah ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut untuk menyelesaikan kajian penerapan program sistem manajemen lalu lintas regional di kota Samarinda, antara lain:

1. Tingkatkan anggaran dengan mengajukan anggaran yang sangat dibutuhkan ke APBN dengan cara menentukan target yang ingin dicapai lalu menyusun detail perencanaan yang dimulai dari menentukan sumber daya yang belum kita miliki, bagaimana cara memperoleh sumber daya tersebut, kapan kita melaksanakan program, sampai bagaimana kita melaksanakan program tersebut, karena semua orang tahu bahwa penting untuk mendukung operasi program ATCS. Dengan anggaran yang ada dari APBD sekitar 2,5 Milyar masih sangat sedikit, sehingga diperlukan anggaran yang lebih besar agar program ini dapat berjalan maksimal dengan peralatan yang lengkap dan kualitas yang baik. Bahkan kita dapat membangun kerja sama dengan pihak Corporate social Responsibility (CSR) seperti bank-bank daerah untuk mendapatkan dana agar dapat memenuhi anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ATCS.
2. Penambahan sarana yang lebih lengkap untuk memantau area lapangan dan mengatur lalu lintas dengan lebih optimal. Serta meningkatkan prasarana berupa memperbesar ruang kendali ATCS untuk mengendalikan dan memantau lebih luas simpang yang ada di Kota Samarinda. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan ketertiban seluruh pengguna jalan dan juga untuk meningkat kinerja tenaga pelaksana agar lebih maksimal dalam mencapai tujuan.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. 2016. *Buku - Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alam, D. F., Juwandi, R., & Lestari, R. Y. 2021. "Implementasi *Area Traffic Control System* Dalam Konteks Kepatuhan Berlalu Lintas Di Kota Serang". *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*. Diunduh dari <https://ejournal.lppmunbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/1100> pada 6 Desember 2021
- Armansyah, K. 2018. Hubungan Sarana Prasarana dan Caring Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Pada Ruang Rawat Inap RSUD Dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Diunduh dari <http://repository.ump.ac.id/8213/> pada 9 Mei 2023
- Da Cruz, A. 2018. Analisis Biaya Pemilihan Moda Transportasi Untuk Perjalanan Menuju Kampus (Studi Kasus: Kota Dili, Timor -Leste). *Thesis*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diunduh dari <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/15491> pada 6 Desember 2021
- Hamali, Y. A. 2016. *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Mengelola Karyawan*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

- Leyn, A. N. 2019. Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur. *Skripsi*. Universitas Katolik Widya Mandira. Diunduh dari <http://repository.unwira.ac.id/id/eprint/2109> pada 22 Januari 2022
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publikations
- Mustari, N. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). Yogyakarta : PT.LeutikaPrio Nouvalitera.
- Nasution, A. F. 2013. Pengaruh Kecukupan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Negeri Medan. <https://doi.org/10.4324/9781315716534-25> Diunduh pada 19 Maret 2023
- Naway, F. R., & Suryani, F. 2023. "Perencanaan *Area Traffic Control System (ATCS)* Untuk Optimasi Kinerja Persimpangan pada jalan H.M Joyo Martono, Kota Bekasi." *Jurnal Sains dan Teknologi Vol 7 No 1 Maret 2023*. Diunduh dari <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-teknologi/article/view/2320/1725> pada 3 Agustus 2023
- Neviana, N. E., & Soedarsono, D. K. 2020. "Kegiatan Komunikasi *ATCS* Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung (Studi Deskriptif *ATCS* Kota Bandung Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Pengeras Suara di Persimpangan)". *Proceeding of International Conference on Communication, Culture and Media Studies (CCCMS)*. Diunduh dari <https://openlibrarypublikations.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/issue/view/135> pada 6 Februari 2023
- Nugroho, S. 2021. Pengaruh Gaya Kepemimpinan *Laissez-Faire* dengan Kinerja Karyawan (Studi Pada Cv. Samyo Makmur AbadiKota Cimahi). *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia. Diunduh dari <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5063> pada 8 Agustus 2023
- Paliema et al. 2016. "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara)". *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, vol. 1, no. 37, 2016*. Diunduh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/11749> pada 17 Februari 2023.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Pusdikmin, L. 2014. "Koordinasi dan Kolaborasi Koordinasi dan Kolaborasi Pemerintahan". *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*. Diunduh dari [http://pusdikmin.com/perpus/file/bahanajar/koordinasi dan kolaborasi pim4.pdf](http://pusdikmin.com/perpus/file/bahanajar/koordinasi%20dan%20kolaborasi/pim4.pdf) pada 9 Mei 2023
- Reza, R. 2019. Prosedur Pencarian dan Pertolongan Korban Kapal Tenggelam di Laut Pangandaran Oleh Basarnas Kelas 1 Bandung. *Karya Tulis*. Universitas Maritim Amni Semarang. Diunduh dari <http://repository.unimar-amni.ac.id/2302/> pada 9 Mei 2023
- Sarah, A. 2017. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan Keuangan (Studi Kasus di Koperasi Teratai Putih Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diunduh dari [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36812/1/ARIA NNE SARAH-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36812/1/ARIA_NNE_SARAH-FDK.pdf) pada 15 Juni 2023
- Sari, C. V. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Program MAPPADECENG di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Diunduh dari https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13608-Full_Text.pdf pada 9 Agustus 2023
- Setiawan, A. 2018. Implementasi Program *Area Traffic Control System* di Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Universitas Lampung. Diunduh dari <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/1100> pada 6 Februari 2023
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Yuliana, Y. 2021. Respon Masyarakat Suda Terhadap Eksistensi BNI Syariah Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. IAIN Parepare. Diunduh dari <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2368> pada 9 Agustus 2023